

Penerapan Asas Keterbukaan pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat

Dita Misriani^{1*}, Rispawati², Bagdawansyah Alqadri³, Yuliatin⁴

¹⁻⁴Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Indonesia
email: ¹⁾ ditamisriani97@gmail.com, ²⁾ rispa64@gmail.com, ³⁾ bagdawansyah@unram.ac.id, ⁴⁾ yuliuunram@yahoo.com

Article Info

Article history:

Received : 01 - 12, 2022

Revised : 05 - 12, 2022

Accepted : 20 - 01, 2023

Keywords:

Government;
Information Disclosure;
Role;
Transparency.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the village government in applying the principle of openness to village government, the factors that influence the implementation of the principle of openness, and the village government's efforts to apply the principle of openness and transparency in Dasan Tapen Village, Gerung District, West Lombok Regency. A qualitative approach with a descriptive type is applied in this study. Therefore, the subjects in this study were the village head, the secretary of the village finance division and 2 informants from religious and community leaders. The collected data was analyzed through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The analyzed data was tested again through source and time triangulation. The results of this study indicate that the village government's strategy in implementing the principle of openness in the village government of Dasan Tapen village, Gerung district, West Lombok regency included the information preparation, information processing and village apparatus services. Factors that influenced the application of the principle of openness to village government include internal factors such as facilities and human resources. While the external factors consist of cooperation, community ideas or ideas, and the leadership of the village head. The implementation of the principle of openness in the village government is by implementing Law Number 6 of 2014 concerning villages.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



*Corresponding Author:

Dita Misriani

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Mataram, Indonesia

Email: ditamisriani97@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah organisasi penyelenggara kegiatan pemerintahan dan kegiatan masyarakat wilayah tertentu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2016, Pasal 1 Ayat 2). Pemerintah desa adalah pemerintah yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan beberapa perangkat desa membantu dalam melaksanakan pengabdianya kepada masyarakat desa. Pemerintah desa berkomitmen untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya masyarakat, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, dan memberdayakan desa untuk melaksanakan pemerintahan yang baik.

Terlaksananya pemerintahan yang baik atau sering kita sebut *good governance* menjadi impian bagi seluruh masyarakat. Dimana kepala desa mampu melayani masyarakat secara baik dan adil. Secara teoritis pemerintahan yang baik mengandung makna bahwa pengelolaan kekuasaan yang berdasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, pengambilan kebijakan secara terbuka, serta pertanggung jawaban kepada masyarakat (Kaloh 2010:172). Dapat dipahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik bukan hanya

urusan pemerintahan atau negara, tetapi dapat tercapai apabila tata kelola pemerintahan memenuhi asas-asasnya.

Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk melakukan survey untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penerapan prinsip transparansi di Pemerintah Kab. Lombok Barat. Desa Dasan Tapen Kec. Gerung Kab. Lombok Barat merupakan desa yang berstatus sebagai salah satu desa termaju di Kab. Lombok Barat. Beberapa jaringan dan layanan internet yang mendukung layanan lainnya tersedia di berbagai lokasi di Desa Dasan Tapen. kegiatan pemerintahan desa.

Asas keterbukaan merupakan asas yang harus dilakukan pada pengelolaan dan penyampaian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Tujuan pertukaran informasi yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah agar masyarakat desa mendapatkan informasi tentang kebijakan dan praktik pemerintah desa. Transparansi telah diperluas ke beberapa peraturan desa, yang pertama adalah Pasal 24 yang menyatakan bahwa prinsip pemerintahan desa yaitu keterbukaan pada hak masyarakat demi mendapat informasi benar, jujur dan tidak bersifat diskriminatif. Keterbukaan pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dapat memotivasi sekaligus memberikan stimulus kepada masyarakat agar dapat melaksanakan setiap proses yang berlangsung di desa.

Desa adalah daerah pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah unit terkecil dari sebuah kecamatan, yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa dapat digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal.

Transparansi merupakan asas keterbukaan yang disampaikan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya perselisihan antara aparat desa dan masyarakat. Pelaksanaan pemerintah desa, mengacu pada ketentuan hukum (UU No. 6 Tahun 2014, 24 d) UU No. 6 (2014) Pasal 68 (1). Transparansi dapat dilihat dari tiga segi, yaitu adanya kebijakan pengawasan yang terbuka, kemampuan memperoleh informasi yang memungkinkan akses publik terhadap semua aspek kebijakan pemerintah dan asas unbundling. energi. eksekutif dan parlemen (Sedarmayanti, 2009).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif peneliti (Arikunto, 2013:19). Maka subyek dalam penelitian ini, adalah kepala desa, sekretaris desa perangkat desa bagian keuangan dan 2 informan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan analisa data-data yang dilakukan pada penelitian ini melalui kegiatan mereduksi data, penyajian dan penalaran menurut Miles dan Huberman (Sugiyono 2018). Dalam hal ini teknik pengujian keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, dimana (Sugiyono, 2018) mengartikan triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan data dari beberapa teknik pengumpulan data yang ada dan sumber data. Triangulasi yang digunakan adalah membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada beberapa tahapan dalam penerapan asas keterbukaan pada pemerintah Desa Dasan Tapen yang pertama adalah persiapan informasi, kedua mengolah informasi dan yang ketiga menyampaikan informasi. Berikut hasil wawancara terkait penerapan prinsip keterbukaan pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kec. Gerung Kab. Lombok Barat.

1) Persiapan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka langkah awal yang perlu di siapkan dalam menyusun informasi adalah menyiapkan informasi yang akan disiapkan mengenai Keterbukaan informasi juga dilakukan dengan mengedepankan aspek tranparansi yang berupa rincian anggaran di masing masing program yang bisa di pampang di papan informasi tersebut.

Menurut pengertian dari persiapan menurut KBBI adakah perlengkapan dan persediaan perbuatan (hal dan sebagainya) bersiap-siap untuk mempersiapkan tindakan untuk sesuatu, seperti halnya menggali informasi ke masyarakat terlebih dahulu. Keterbukaan Informasi harus dilaksanakan secara baik dan benar sebagai bentuk serta wujud tanggung jawab kepada masyarakat. Keterbukaan informasi juga dilakukan dengan mengedepankan aspek tranparansi yang berupa rincian anggaran di masing masing program yang bisa di pampang dipapan informasi tersebut.

2) Mengolah Informasi

Berdasarkan hasil Penelitian setelah mengundang para tokoh-tokoh yang ada di desa ini hal pertama yang dilakukan dalam rapat adalah menyesuaikan dengan agenda yang dibuat. Dan disajikan dalam bentuk dokumen yang diteliti adalah gambaran penerapan prinsip keterbukaan di Desa Dasan Tapen Kec. Gerung

Kab. Lombok Barat. Pemerintah desa sudah menyiapkan papan informasi berupa papan reklame yang sudah terpasang di setiap sudut desa supaya masyarakat bisa mengetahui apa saja program yang dijalankan pemerintah desa agar bisa menjalankan asas keterbukaan informasi dan transparansi.

Sejalan dengan pendapat Robert M Gagne dalam Rusman (2014: 139-140) dalam pemrosesan informasi yang mengatakan bahwa pengolahan informasi yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek dari lingkungan, mentransformasi dan, mengkombinasikan informasi yang baru dengan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya.

3) Menyampaikan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian yaitu, menyampaikan informasi dalam menerapkan asas keterbukaan pada pemerintah Desa Dasan Tapan. Dalam proses menyampaikan informasi biasanya yang dilakukan adalah memberitahu kepada masyarakat tentang hasil dari rapat mengenai program yang akan dilaksanakan, melalui media cetak yang berupa papan informasi atau reklame yang sudah terpasang di setiap dusun atau pojok-pojok desa. Akan tetapi tidak banyak program yang dilakukan terkendala covid 19, yang dimana pengalokasian dana desa habis untuk menangani covid, baik dalam bentuk bantuan maupun penanganan.

Sejalan dengan pendapat Achmad dan Harapan (2014:65) yang mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, dimana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data, atau informasi dari seorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa menyampaikan informasi juga dikenal dengan istilah komunikasi dalam tahapan ini proses menyampaikan informasi biasanya dilakukan itu adalah menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil dari musyawarah mengenai program yang akan dilaksanakan desa.

4) Pelayanan Perangkat Desa

a. Tupoksi

Berdasarkan hasil penelitian, tugas pokok dan tugas pelayanan perangkat desa di desa kami salah satunya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan yang terpenting dari tugas dan kewajibannya adalah pelayanan langsung itu sendiri, seperti menangani surat menyurat profesional seperti akta nikah, perceraian, perceraian dan penyelesaian. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi pelayanan perangkat desa sudah cukup baik terlaksana.

Sejalan dengan undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah secara umum tupoksi merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

b. Jadwal Pelayanan

Berdasarkan hasil penelitian, Jadwal pelayanan pemerintah desa untuk menerapkan prinsip keterbukaan kepadaperangkat desa Dasan Tapan. Pelayanan yang diterapkan pemerintah desa, mulai dari hari senin-jum'at mulai pukul 08.00-16.00 wita, dan Alhamdulillah metode pelayannya juga sudah menggunakan system digital yang memudahkan masyarakat mengakses melalui mesin digital yang telah disediakan pemerintah desa.

Sejalan dengan pendapat Delly Mustafa 2013 mengemukakan bahwa pelayanan diberikan kepada masyarakat itu menuntut kualitas. Pelayanan di selenggarakan oleh pemerintah melalui aparaturnya, walaupun tidak bertujuan mencari keuntungan, namun tetap harus mengutamakan kualitas pelayanan sesuai tuntutan, harapan dan kebutuhan masyarakat.

c. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil penelitian Dalam tindak lanjut pelayanan perangkat Desa pada penerapan asas keterbukaan padapemerintah DesaDasan Tapan. Yaitu dengan membuat Laporan tentang bantuan langsung tunai yang sedang berlaku di desa terkait dengan kasus covid 19, bisa juga dalam bentuk laporan fisik yang berlaku di setiap program desa. Kenapa perlu adanya laporan, untuk menunjang proses keterbukaan dan transparansi terhadap masyarakat Desa Dasan Tapan pada umumnya.

Sejalan dengan (hiro tugiman 2006:72) tindak lanjut adalah suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketetapan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan audit yang dilaporkan. Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan tindak lanjut yang ada didesa selalu ada dan itu merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang keterbukaan pemerintah desa.

Berdasarkan dari wawancara, tindakan observasi dan dokumentasi yang dilakukan terhadap 3 subyek dan 2 sumber informasi penelitian di Desa Dasan Tapen Kec. Gerung Kab. Lombok Barat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip transparansi. Jaringan Pemerintah Desa Dasan Tapen Kec. Gerung Kab. Lombok Barat antara lain: faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

1. Fasilitas

Berkaitan dengan fasilitas, fasilitas merupakan sesuatu proses yang dapat memudahkan segala urusan manusia, di desa Dasan Tapen bentuk fasilitas yang disediakan desa berupa papan pengumuman terkait dana desa, dan akses web desa yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Sejalan dengan Zakiah Daradjat (2012: 230) Fasilitas adalah segalanya sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.

2. Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan sumber daya manusia yang dimaksud yaitu perangkat desa mengetahui Tugas dan fungsi sebelum memegang jabatan tertentu di desa, agar mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan serta menempatkan seseorang sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki

Sejalan dengan Noatmodjo (2003) mengungkapkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu peningkatan gizi serta peningkatan aspek non fisik melalui akumulasi bidang pendidikan dan latihan.

3 Masyarakat

Berkaitan dengan masyarakat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berhubungan dengan orang lain. Di Desa Dasan Tapen, masyarakat sangat aktif dalam kegiatan desa terkait dengan berbagai program yang biasa dilakukan di desa. Sejalan dengan Ralph Linton (dalam Soerjono Soekarno, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

4. Program Pemerintah Desa

Berkaitan dengan program pemerintah desa memiliki program kerja yang harus dilaksanakan selama masa jabatannya. Program pemerintah desa merupakan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan bekerjasama dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Menurut Rivai (2006:148) peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan di harapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Peran adalah proses dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka seorang pemimpin harus menjalankan suatu peranannya karena dalam program pembangunan dan pemberdayaan dipengaruhi oleh peran aparatur pemerintah desa.

b. Faktor Eksternal

1. Kerja Sama

Kerja sama biasanya dipahami sebagai kegiatan kerja sama yang dilakukan atas nama atasan atau otoritas. Sejauh ini yang sama-sama kita lakukan antara perangkat desa dengan masyarakat terbilang cukup baik, yang dimana sebagian masyarakat Desa selalu ikut andil dalam kegiatan pemerintah desa. Bentuk kerjasama yang kita lakukan adalah masyarakat selalu ikut dalam kegiatan yang sudah dibuat.

Menurut Zainuddin, 2009, Pengertian Kerjasama merupakan sifat kepedulian terhadap satu orang atau satu pihak dengan orang atau pihak lain dengan di landasi adanya prinsip saling percaya, saling menghargai

2. Ide atau Gagasan Masyarakat

Ide atau gagasan masyarakat sangat diperlukan untuk menopang jalannya roda pemerintahan di desa Dasan Tapen khususnya, disamping itu juga pemerintah desa bisa menyerap aspirasi dari masyarakat mengenai program apa saja yang nantinya bisa di realisasikan dengan cara mengadakan musyawarah di masing-masing dusun.

Menurut Sugiyanto, dkk (2005) mengungkapkan bahwa ide atau gagasan masyarakat merupakan langkah awal dalam proses penciptaan. Ide tersebut berjalan secara sengaja dan di kembangkan menjadi sebuah karya melalui pengolahan berdasarkan pengamatan terhadap lingkungan sekitar.

3. Kepemimpinan Kepala Desa

Kepemimpinan kepala desa sampai saat ini mengenai kebijakan tidak ada temuan sesuatu apapun, dan penilaian kinerja kepaladesa di mata masyarakat bisa di bilang cukup bagus, dimana di setiap penyusunan program pemerintah semua jajaran perangkat desa dan masyarakat tetap di ikut sertakan dan diberikan ruang untuk berpendapat di dalam muswarah desa maupun dusun.

Menurut Agarwal dalam Panji Anogara, (2003:42). Kepemimpinan adalah seni mempengaruhi orang-orang lain untuk mengarahkan kemauan, kemampuan dan usaha mereka dalam mencapai tujuan pemimpin.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintah Desa Dasan Tapan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1. Desa Dasan Tapan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat dalam pelaksanaan asas keterbukaan sudah sesuai dengan keinginan UU No.6 Tahun 2014 tentang desa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintahan Desa Dasan Tapan Kec Gerung Kab. Lombok Barat dikelompokkan menjadi dua yakni faktor Internal meliputi Fasilitas, Sumber Daya Manusia (SDM), Masyarakat dan adanya program pemerintah desa. Sedangkan faktor Eksternal terdiri dari Kerjasama, Ide atau Gagasan Masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Desa

Adapun saran dari peneliti yaitu pelaksanaan Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintah Desa Dasan Tapan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat yaitu :

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan asas keterbukaan pada Pemerintah Desa Dasan Tapan Kec. Gerung Kab. Lombok Barat, sebaiknya pemerintah mengaktifkan kembali website desa untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat.
2. Masyarakat yang bertindak sebagai pengawas administrasi harus lebih aktif dan bijaksana dalam memberikan saran dan berkontribusi dalam kegiatan pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Harapan (2014), *Komunikasi Antarpribadi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Anoraga, Pandji dan Piji. 2003. *Pengantar Pasar Modal*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Arikunto. 2013. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Delly Mustafa, 2013. *Birokrasi Pemerintah*. Makasar: Alfabeta
- Kaloh. 2010. *Kepemimpinan kepala daerah*. Jakarta. Sinar Grafika
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Rineka Cipta
- Rivai, Veithzal, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan : dari Teori Ke Praktik, Edisi Pertama*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rusman. (2014). *Mengembangkan pemrosesan informasi Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto 2004 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sugianto, Dkk. 2005. *ide Atau Gagsan Masyarakat*. Jakarta: Erlangga
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian Pendidikan*. Bandung : CV Alfabeta
- Tugiman, Hiro. 2006. “Standar Profesional Internal Audit”, Bandung: PT Eresco Tugiman. Hiro 2006. “Standar Profesi Audit
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Zainuddin, 2009, *Pengertian Kerjasama*, Jakarta. PT. Bina Rena Pariwisata
- Zakiah Daradjat. 2012. *Fasilitas Transportasi Konsumen*. CV Alfabeta. Bandung.